



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor : 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor : 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 318);
21. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN POHJENTREK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pohjentrek yang selanjutnya disingkat RKA Kecamatan Pohjentrek adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Kecamatan Pohjentrek serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Renja Kecamatan RKA Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Kecamatan Pohjentrek, hasil evaluasi Renja Kecamatan Pohjentrek tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Kecamatan Pohjentrek tahun berjalan.

Pasal 4

(1) Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Kecamatan Pohjentrek.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SYAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 74

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN POHJENTREK
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2021**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 74 TAHUN 2021
TANGGAL : 2 AGUSTUS 2021

**RENCANA KERJA
KECAMATAN POHJENTREK
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

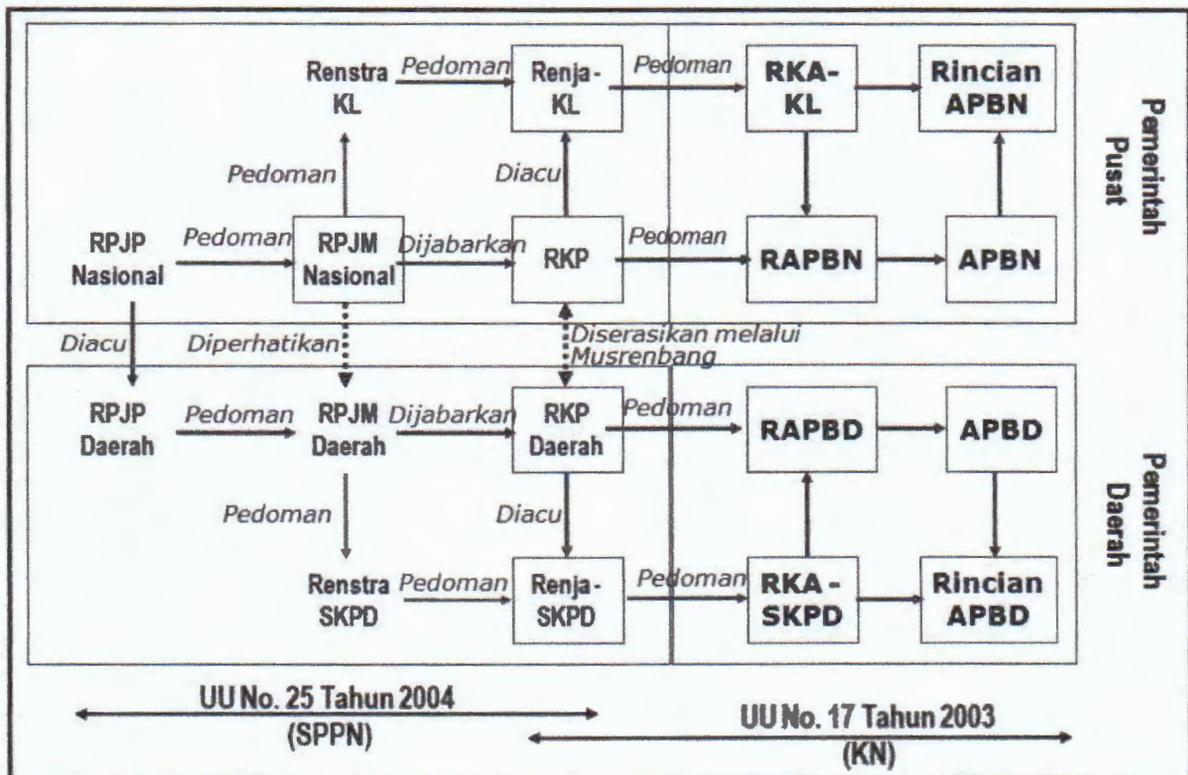
1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, disusun suatu perencanaan pembangunan yang berasal dari perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Pohjentrek sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Kecamatan Pohjentrek. Kewenangan tersebut adalah dalam hal menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja OPD Kecamatan Pohjentrek disusun atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua

atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Intruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
19. Peraturan Bupati Pasuruan nomor tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Pasuruan nomor tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan rencana kerja Kecamatan Pohjentrek adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat anggaran serta dalam rangka kelanjutan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021 sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kecamatan Pohjentrek dan guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi dan misi Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek adalah sebagai berikut :

1. Renja OPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.
2. Renja OPD disusun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk

menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pohjentrek

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Kecamatan Pohjentrek disusun dengan sistematika penulisan sesuai lampiran **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** dengan outline sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Pohjentrek, proses penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek, keterkaitan antara Renja Kecamatan Pohjentrek dengan dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan, Renstra Kecamatan Pohjentrek, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan Kecamatan Pohjentrek, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pohjentrek.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Pohjentrek, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pohjentrek 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun lalu dan Tahun Berjalan serta capaian

Renstra Kecamatan Pohjentrek, Membahas tentang pemberian nilai atau pertimbangan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Pohjentrek.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan sejumlah kegiatan/Kinerja Kecamatan Pohjentrek untuk digolongkan atau dikelompokkan menurut kriteria tertentu.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Menentukan tahapan-tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan dan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan serta dicantumkan dalam isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Melakukan tinjauan ulang (Review) terhadap rencana awal kegiatan – kegiatan dengan hasil yang ingin dicapai.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan tentang proses usulan program kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan diharapkan usulan – usulan tersebut dapat terakomodir semaksimal mungkin dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Merupakan acuan terhadap kebijakan-kebijakan umum dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Harapan yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pohjentrek dalam kurun

waktu tertentu dengan rumusan yang lebih spesifik, terstruktur, dan dapat diaplikasikan melalui Rencana Kerja.

3.3. Program dan Kegiatan

Meliputi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkungan OPD Kecamatan Pohjentrek serta penganggaran atau biaya yang dibutuhkan dalam merealisasikan kegiatan.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN POHJENTREK
TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Pohjentrek

Renja Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Kecamatan Pohjentrek. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan tujuan yang ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Pohjentrek melalui tabel 2.1 berikut : *(lihat pada halaman lampiran-lampiran)*

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun tahun berjalan
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN POHJENTREK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	UNSUR KEWILAYAHAN									
	KECAMATAN									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase pemenuhan pelayanan Kantor	100%	100%	100%	100%		100%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah rekening listrik dan telepon yang dibayar	3 rek - 60 bulan	3 rek - 12 bulan	3 rek - 12 bulan	3 rek - 12 bulan		3 rek - 12 bulan		
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	Honorarium pengelola keuangan	8 orang- 60 bulan	8 orang- 12 bulan	8 orang- 12 bulan	8 orang- 12 bulan		8 orang- 12 bulan		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Upah petugas kebersihan	1 Orang - 60 bulan	1 Orang - 12 bulan	1 Orang - 12 bulan	1 Orang - 12 bulan		1 Orang - 12 bulan		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah pengadaan ATK	19 Jenis - 20 kali	19 Jenis - 4 kali	19 Jenis - 4 kali	19 Jenis - 4 kali		19 Jenis - 4 kali		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan dan penggandaan dalam Setahun	4 Jenis - 16 kali	4 Jenis - 4 kali	4 Jenis - 4 kali	4 Jenis - 4 kali		4 Jenis - 4 kali		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang memadai dalam Setahun	23 jenis - 16 kali	23 jenis - 4 kali	23 jenis - 4 kali	23 jenis - 4 kali		23 jenis - 4 kali		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jumlah Peralatan Rumah Tangga.	8 jenis		2 jenis	2 jenis		2 jenis		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah bacaan yang dibeli	36 eks	12 eks	12 eks	12 eks		12 eks		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat.	Jumlah Konsumsi	1980 paket	660 paket	660 paket	660 paket		660 paket		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi	24 laporan	12 laporan	6 laporan	6 laporan		6 laporan		
	Penyediaan Jasa Perkantoran	Honorarium Pegawai Kontrak/PTT & THL	14 orang -12 bulan	14 orang -12 bulan	14 orang -12 bulan	14 orang -12 bulan		14 orang -12 bulan		
	Penyediaan Pakaian Kerja	Jumlah Pakaian yang dibeli	40 stel		20 stel	20 stel		20 stel		
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Prosentase Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian	100%	100%						
	Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah Pakaian Kerja bagi Pegawai	10 stel	10 stel						
	Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian Khusus hari-hari tertentu bagi pegawai	20 stel	20 stel						
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Prosentase sarana dan prasarana kondisi baik	100%	100%	100%	100%		100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas.	Jumlah Kendaraan dinas yang dibeli	1 unit	-				1 unit		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	2 paket	-	1paket	1paket		1paket		
	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor yang dibeli	1paket	-				1paket		
	Pengadaan Peralatan Gedung/kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	71 unit	6 unit	55 unit	55 unit		6 unit		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor.	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 unit - 5 kali	2 unit - 1 kali	2 unit - 1 kali	2 unit - 1 kali		2 unit - 1 kali		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	1 unit - 4 kali	1 unit - 1 kali	1 unit - 1 kali	1 unit - 1 kali		1 unit - 1 kali		
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.	Terpeliharanya Kendaraan dinas Kantor dalam Setahun	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor.	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Gedung/kantor	9 unit - 20 kali	9 unit - 4 kali	9 unit - 4 kali	9 unit - 4 kali		9 unit - 4 kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	2 unit - 5 kali	1 unit - 1 kali	1 unit - 1 kali	1 unit - 1 kali		2 unit - 1 kali		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair.	Jumlah pemeliharaan Meubelair.	1 kali					1 kali		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab	1 unit	-				1 unit		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase aparatur desa/ kelurahan yang telah dibina	100%	100%						
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.	Jumlah peserta sosialisasi	54 orang	54 orang						
	PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi pemerintahan kecamatan dengan baik	4 kegiatan	4 kegiatan						
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi & koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	9 Laporan	9 Laporan						
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/ KELURAHAN	prosentase desa yang melaporkan keuangan tepat waktu	70%	70%				70,05		
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi & Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	8 Laporan	8 Laporan				86,97		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	Nilai SAKIP Kecamatan	70,05		65,50	65,50		2 Lap		
		Nilai IKM Kecamatan	86,97			86,94				
	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	4 Lap		2 Lap	2 Lap		4 laporan		
	Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah aparatur yang dilibatkan	30 pegawai		30 pegawai	30 pegawai		4 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintah Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi	8 laporan		4 laporan	4 laporan				
	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ Kelurahan	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Pembinaan	8 laporan		4 laporan	4 laporan				
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang		60 orang	60 orang				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase laporan capaian kinerja dan laporan keuangan yang terpenuhi secara tepat waktu	100%	100%						
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Laporan Keuangan	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Laporan Keuangan	2 laporan	2 laporan						
	Forum Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan.	Laporan Hasil Forum	1 laporan	1 laporan						
	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	prosentase penyelesaian kasus kamtrantibmas sesuai kewenangan kecamatan	80%	80%						
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan.	Laporan Hasil Koordinasi	5 laporan	5 laporan						
	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN	Rasio jumlah kejadian yang terfasilitasi terhadap jumlah kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	90%		90%	90%		90%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Kecamatan	2 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan		
	Fasilitasi penegakan Perda/Perkada	Jumlah Fasilitasi penegakan Perda/Perkada	4 kali					4 kali		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2021	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2021	Target Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun 2020 (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja OPD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra OPD s/d tahun 2021 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja Tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	Jumlah Laporan Koordinasi	4 dokumen		4 dokumen	4 dokumen				
	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Prosentase lembaga/organisasi masyarakat yang dibina	95%	95%						
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat.	Laporan Hasil Fasilitasi	18 dokumen	18 dokumen						
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.	Laporan Hasil Koordinasi	7 dokumen	7 dokumen						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	7 lembaga		6 lembaga	6 lembaga		7 lembaga		
		Prosentase usulan musrenbang yang terfasilitasi	100%		100%	100%		100%		
	Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	Laporan Hasil Forum	2 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		
	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	36 dokumen		18 dokumen	18 dokumen		18 dokumen		
	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	14 dokumen		7 dokumen	7 dokumen		7 dokumen		

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program kegiatan Kecamatan Pohjentrek Tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp. 1.184.716.979,50,- dan dari jumlah tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 1.175.230.565,00,- atau sebesar 99,19% dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per kegiatan Kecamatan Pohjentrek dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAFTAR REKAPITULASI
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI UMUM (D A U)
per 31 Desember 2020

NO. U RUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEMBANG (KURANG) (Rp.)
1	2	3	4	5
401	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.184.716.979,50	1.175.230.565,00	(9.486.414,50)
401.401.09	KECAMATAN	1.184.716.979,50	1.175.230.565,00	(9.486.414,50)
401.401.09.06	KECAMATAN POHJENTREK	1.184.716.979,50	1.175.230.565,00	(9.486.414,50)
401.401.09.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	678.342.580,00	671.119.235,00	(7.223.345,00)
401.401.09.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.672.580,00	23.621.535,00	(6.051.045,00)
401.401.09.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	39.720.000,00	39.720.000,00	0,00
401.401.09.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
401.401.09.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	12.489.700,00	(10.300,00)
401.401.09.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan	15.000.000,00	14.970.000,00	(30.000,00)
401.401.09.06.01.13	Penyediaan Perabot dan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.463.000,00	(37.000,00)
401.401.09.06.01.15	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	1.350.000,00	600.000,00	(750.000,00)
401.401.09.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	71.750.000,00	71.605.000,00	(145.000,00)
401.401.09.06.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	70.700.000,00	70.700.000,00	0,00
401.401.09.06.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran	383.850.000,00	383.950.000,00	0,00
401.401.09.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	394.339.999,50	392.879.230,00	(1.460.769,50)
401.401.09.06.02.11	Pengadaan Perabot Kantor	63.400.000,00	63.400.000,00	0,00
401.401.09.06.02.21	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
401.401.09.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	200.000.000,00	199.000.000,00	(1.000.000,00)
401.401.09.06.02.24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	87.394.999,50	86.936.430,00	(458.569,50)
401.401.09.06.02.26	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	30.545.000,00	30.542.000,00	(3.000,00)
401.401.09.06.02.30	Pemeliharaan Rutin/berkala Perabot Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
401.401.09.06.41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN	31.200.000,00	31.197.700,00	(2.300,00)
401.401.09.06.41.01	Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
401.401.09.06.41.02	Fasilitasi & Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	0,00
401.401.09.06.41.03	Penyusunan LAKIP dan Laporan Keuangan	3.200.000,00	3.197.700,00	(2.300,00)
401.401.09.06.41.21	Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kecamatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
401.401.09.06.41.70	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
401.401.09.06.42	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN	61.546.400,00	60.546.400,00	(1.000.000,00)
401.401.09.06.42.01	Penunjang Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
401.401.09.06.42.03	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	16.346.400,00	15.346.400,00	(1.000.000,00)
401.401.09.06.42.08	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	32.200.000,00	32.200.000,00	0,00
401.401.09.06.43	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERANGAN UMUM KECAMATAN	19.400.000,00	19.400.000,00	0,00
401.401.09.06.43.01	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik dan Pencegahan kejahatan	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
401.401.09.06.43.02	Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteraturan Kecamatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00

Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2021

Anggaran belanja/ pengeluaran Kecamatan Pohjentrek tahun 2021 ditargetkan sebesar **Rp. 3.076.514.580,00** dari jumlah tersebut sampai dengan Tribulan I tahun 2021 dapat terealisasi sebesar **Rp. 612.736.368,00** atau **19,91 %**. Anggaran Kecamatan Pohjentrek terbagi menjadi 10 kegiatan. Realisasi per kegiatan Kecamatan Pohjentrek dapat diuraikan sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	%
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	3.076.514.580	612.736.368	19,91
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.032.427.580	575.486.368	18,98
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.277.200	2.135.500	49,91
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.138.600	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.138.600	2.135.500	99,85
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.491.675.000	535.790.105	21,503
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.976.515.000	407.300.105	20,60
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	475.800.000	118.650.000	24,94
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	39.360.000	9.840.000	25,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.909.599	16.827.900	28,56
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.048.229	2.412.500	39,89
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.587.470	2.345.400	30,91
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.459.900	2.170.000	39,74

7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.814.000	9.900.000	24,86
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.520.381	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.300.000	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.220.381	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.643.200	4.711.450	15,37
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.643.200	4.711.450	15,37
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.402.200	16.021.413	6,55
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.321.400	14.471.413	35,02
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.880.800	1.550.000	39,94
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.200.000	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.787.000	29.750.000	85,52
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di	9.950.000	9.950.000	100

	Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.950.000	9.950.000	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.837.000	19.800.000	79,72
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.837.000	19.800.000	79,72
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.600.000	6.600.000	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.600.000	6.600.000	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.600.000	6.600.000	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.700.000	900.000	33,33
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.700.000	900.000	33,33
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.700.000	9.00.000	33,33

Target dan realisasi belanja per Program/Kegiatan sampai dengan bulan Maret tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TAHUN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	%
7	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01	KECAMATAN	1.583.761.483	612.736.368	38,68
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.546.511.483	575.486.368	37,21
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.138.600	2.135.500	99,85
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.138.600	2.135.500	99,85
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.117.076.500	535.790.105	47,96
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	988.286.500	407.300.105	41,21
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	118.950.000	118.650.000	99,74
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	9.840.000	9.840.000	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	31.934.322	16.827.900	52,69
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.419.291	2.412.500	99,72
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan	2.367.071	2.345.400	99,08

	Logistik Kantor			
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.183.960	2.170.000	99,36
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.964.000	9.900.000	39,66
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.220.381	0,00	0,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.220.381	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.660.800	4.711.450	61,50
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.660.800	4.711.450	61,50
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.280.880	16.021.413	7,37
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	16.528.560	14.471.413	87,55
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.552.320	1.550.000	99,85
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.200.000	0,00	0,00
7.01.02	PROGRAM	29.750.000	29.750.000	100

	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9.950.000	9.950.000	100
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.950.000	9.950.000	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19.800.000	19.800.000	100
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.800.000	19.800.000	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.600.000	6.600.000	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.600.000	6.600.000	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6.600.000	6.600.000	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	900.000	900.000	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan	900.000	900.000	100

	Ketertiban Umum			
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	900.000	9.00.000	100

Secara umum, pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pohjentrek sampai dengan tahun 2020, telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA), serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun laporan capaian kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Tahun 2020 dengan Target Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target Renstra (2023)	Selisih
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (IKM)	86,94	87,00	0,06
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	67,32	80,01	12,69

Di dalam perjalanan selama pelaksanaan pekerjaan, dijumpai pula beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;

- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap program, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi output kegiatan yang menunjang efektifitas program/kegiatan.
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan program/kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pohjentrek dalam pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Strategi mendorong berkembangnya tanggungjawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi (reward and punishmen), dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi.
2. Strategi pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kecamatan Pohjentrek dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas

rencana pembangunan dibidang ekonomi, sosial budaya dan sarana prasarana wilayah.

3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan;
 - b. Melaksanakan pembangunan yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya dan antar sektor pembangunan;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pohjentrek

Kecamatan Pohjentrek senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan prima yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Pohjentrek akan sepenuhnya mendukung Kepala Daerah dalam menjalankan peran strategisnya di bidang pemerintahan umum.

Adapun Kinerja Pelayanan di Kecamatan Pohjentrek dapat dilihat dari indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, yaitu :

1. Nilai SAKIP Kecamatan
2. Nilai IKM Kecamatan

Sesuai dengan Laporan kinerja instansi Kecamatan Pohjentrek tahun 2020 Kecamatan Pohjentrek telah mencapai target kinerja, sebagai berikut :

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	% Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	86,94	86,94	100
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	64,00	67,32	105,18

Terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 dan Target Capaian Kinerja pada Tahun-Tahun berikutnya dapat diproyeksikan melalui tabel 2.2 berikut :

(lihat pada halaman lampiran-lampiran)

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kec. Pohjentrek
Kabupaten Pasuruan

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Kec. Pohjentrek				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) Kecamatan		80,01	65,50	70,05	75,05	80,01	67,32		75,05	80,01	Target 2020
2	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)		87,00	86,94	86,97			86,94				Target 2020
3	Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas (Ketepatan Waktu, Prosedur dan Persyaratan Pelayanan, Pejabat yang Bertanggungjawab terhadap Pelayanan)					100	100					
4	Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina (PELATIHAN DAN PEMBINAAN, SOSIALISASI)					100	100					
5	Persentase Konflik yang tertangani diwilayah Kecamatan					100	100					

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kecamatan Pohjentrek adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Pohjentrek maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Pohjentrek harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Pohjentrek yang sejahtera.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pohjentrek bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Pohjentrek mendukung Grand Design Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 yaitu Kelembagaan Ekonomi Desa dengan Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
- 2) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pelayanan Prima dan Inovatif. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum serta pelayanan berbasis teknologi dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan

Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- 4) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Pohjentrek meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

2. Lingkungan Eksternal

Peluang

- RPJPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 – 2025 Tahap kedua (2019 – 2023)
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat peningkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
- Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat.
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya telah memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan dengan Rancangan Renja OPD.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang seperti kebanyakan usulan selama ini.

Adapun Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Pohjentrek sebagai upaya keterpaduan antara RKPD dengan Renja OPD seperti pada Tabel 2.4 berikut : **(lihat pada halaman lampiran-lampiran)**

Tabel 2.4
Review Rancangan awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : KECAMATAN POHJENTREK

Kode	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN POHJENTREK	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	2.688.126.029,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN POHJENTREK	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	100%	2.688.126.029,00
7.01.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%	2.400.000,00	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	100%	2.400.000,00
7.01.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 1.200.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	5 Dokumen	1.200.000,00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 1.200.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	5 Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2.01.06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 1.200.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	5 Dokumen	1.200.000,00	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 1.200.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Dokumen yang dihasilkan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	5 Dokumen	1.200.000,00
7.01.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%	2.458.871.000,00	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honorarium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	100%	2.458.871.000,00
7.01.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input : - Bel. Pegawai : 1.943.711.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	14 Bulan	1.943.711.000,00	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Input : - Bel. Pegawai : 1.943.711.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	14 Bulan	1.943.711.000,00
7.01.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input : - Bel. Pegawai : 475.800.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	475.800.000,00	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Input : - Bel. Pegawai : 475.800.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	475.800.000,00

Kode	Rencana Awal RKPD 2020					Realisasi Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Page Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Input : - Bel. Pegawai : 39.360.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	39.360.000,00	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Input : - Bel. Pegawai : 39.360.000,00 - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	39.360.000,00
7.01.01.2.05	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang menerima manfaat	22 Pegawai	7.000.000,00	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pegawai yang menerima manfaat	22 Pegawai	7.000.000,00
7.01.01.2.05.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah pakaian dinas yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	20 Stel	5.000.000,00	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah pakaian dinas yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	20 Stel	5.000.000,00
7.01.01.2.05.09	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 2.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah pegawai yang diikuti Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Orang	2.000.000,00	2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 2.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah pegawai yang diikuti Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Orang	2.000.000,00
7.01.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	100%	23.855.029,00	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	100%	23.855.029,00
7.01.01.2.06.02	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	15 Jenis	5.000.000,00	1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	15 Jenis	5.000.000,00
7.01.01.2.06.04	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	3 Komponen	5.000.000,00	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	3 Komponen	5.000.000,00

Kode	Rencana Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.06.05	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.855.029,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Jenis	3.855.029,00	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.855.029,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Jenis	3.855.029,00
7.01.01.2.06.09	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Paket	10.000.000,00	4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Paket	10.000.000,00
7.01.01.2.07	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	5 Kegiatan	133.000.000,00	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	5 Kegiatan	133.000.000,00
7.01.01.2.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kendaraan yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	-	1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Kendaraan yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	-
7.01.01.2.07.06	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 3.000.000,00 Dana Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Unit	3.000.000,00	2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 3.000.000,00 Dana Output : Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	4 Unit	3.000.000,00
7.01.01.2.07.09	3 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 50.000.000,00 Dana Output : jumlah gedung dan bangunan yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	50.000.000,00	3 Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 50.000.000,00 Dana Output : jumlah gedung dan bangunan yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	50.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD 2020					Realisasi Kebutuhan				
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.01.2.07.10	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 50.000.000,00 Dana Output : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	50.000.000,00	4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 50.000.000,00 Dana Output : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	50.000.000,00
7.01.01.2.07.11	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 30.000.000,00 Dana Output : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	30.000.000,00	5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : - - Bel. Modal : 30.000.000,00 Dana Output : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Unit	30.000.000,00
7.01.01.2.08	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	12 Bulan	15.000.000,00	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	12 Bulan	15.000.000,00
7.01.01.2.08.02	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	15.000.000,00	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 15.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	15.000.000,00
7.01.01.2.09	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	4 Kegiatan	48.000.000,00	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	4 Kegiatan	48.000.000,00
7.01.01.2.09.01	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 30.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	30.000.000,00	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 30.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	12 Bulan	30.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)	
7.01.01.2.09.06	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Jenis	3.000.000,00	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Peralatan Kantor dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	2 Jenis	3.000.000,00
7.01.01.2.09.09	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00	3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00
7.01.01.2.09.10	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00	4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00
7.01.01.2.09.11	5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00	5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara Outcome : Nilai SAKIP Kecamatan	1 Ls	5.000.000,00
7.01.02	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PONJENTREK	Nilai SKM Kecamatan	86,98	10.000.000,00	2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN PONJENTREK	Nilai SKM Kecamatan	86,98	10.000.000,00
7.01.02.2.01	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	10.000.000,00	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	2 Sub Kegiatan	10.000.000,00

Kode	Rencana Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7.01.02.2.01.01	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00	1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Hasil Forum Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Laporan	5.000.000,00
7.01.02.2.01.02	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	5 Laporan	5.000.000,00	2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 5.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas kecamatan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	5 Laporan	5.000.000,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN POHJENTREK	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	1 Organisasi	3.300.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN POHJENTREK	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	1 Organisasi	3.300.000,00
7.01.03.2.01	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	3.300.000,00	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	1 Laporan	3.300.000,00
7.01.03.2.01.03	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.300.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Laporan	3.300.000,00	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 3.300.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Laporan Outcome : Nilai IKM Kecamatan	1 Laporan	3.300.000,00
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN POHJENTREK	Basis Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	16.000.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN POHJENTREK	Basis Jumlah Kejadian yang Terfasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	100%	16.000.000,00
7.01.04.2.01	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	2 Sub Kegiatan	16.000.000,00	1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	2 Sub Kegiatan	16.000.000,00
7.01.04.2.01.01	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Rapat koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI Outcome : Nilai IKM Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00	1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 10.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana : Output : Jumlah Rapat koordinasi dan operasi lapangan dengan aparat TNI, POLRI Outcome : Nilai IKM Kecamatan	4 Laporan	10.000.000,00

Kode	Rancangan Awal RKPD 2020					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(5)	(6)		
7.01.04.2.01.02	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Outcome : Nilai IKM Kecamatan	6 Laporan	6.000.000,00	2 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Input : - Bel. Pegawai : - - Bel. Barang & Jasa : 6.000.000,00 - Bel. Modal : - Dana Output : jumlah koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Outcome : Nilai IKM Kecamatan	6 Laporan	6.000.000,00	
Total Belanja PD					2.717.426.029,00	Total Belanja PD					2.717.426.029,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Kecamatan Pohjentrek Tahun 2021 yang disusun berdasarkan pagu indikatif merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*. Perencanaan ini disusun dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang dimana telah dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan di masyarakat.

Namun, Renja Kecamatan Pohjentrek saat ini masih belum mengakomodir usulan usulan dari masyarakat secara umum dikarenakan masih minimnya antusiasme dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Kedepannya diharapkan Kecamatan Pohjentrek mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam menyalurkan usulan program dan kegiatan di masyarakat yang nantinya usulan-usulan tersebut diharapkan dapat terakomodir dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pohjentrek dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

(tabel 2.5 : lihat Pada Halama lampiran-lampiran)

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Pohjentrek

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*.

Dalam hal ini kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Pohjentrek telah disesuaikan dengan arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mengacu pada Kebijakan Nasional guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran yakni :

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan perkembangan budaya hidup sehat agar tercipta aparatur yang profesional dan proporsional dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik
- Pemenuhan sarana infrastruktur publik yang berkualitas dan merata
- Penguatan dan percepatan ekonomi yang handal, terintegrasi antar sektoral serta antar wilayah satu dengan lainnya.
- Mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, peningkatan kualitas gizi, serta tersedianya instrumen jaminan pangan bagi setiap rumah tangga
- Peningkatan upaya dan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- Penguatan kelembagaan dan aparatur serta eksistensi pemerintahan berkualitas melalui peningkatan Reformasi Birokrasi

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Pasuruan

No.	Kebijakan Nasional/ Provinsi	Sumber	Keterangan
1	2	3	4
A	Nasional		
I.	Arah Kebijakan Nasional RPJMN 2015 - 2022 :	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022	Oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas
	- Menyiapkan Landasan Pembangunan yang kokoh :		
	- Memantapkan kualitas reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik		
	- Meningkatkan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional		
	- Meningkatkan penegakan Hukum dan HAM yang berkualitas		
	- Mewujudkan regulasi yang efektif dan efisien		
B.	Provinsi		
II.	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur	Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur 2020- 2022	
	- Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan HAM, diarahkan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap HAM, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, melalui :		
	- Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM		
	- Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak kepada rakyat kecil		

	- Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba dan terorisme		
	- Meningkatkan kerja sama yang harmonis antara kelompok atau golongan masyarakat		
	- Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan Publik, melalui :		
	- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara		
	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan		
	- Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang jelas tolak ukurnya.		
	- Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik		
	- Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu		

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN POHJENTREK

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diinformasikannya tujuan strategis ini, maka Kecamatan Pohjentrek Kabupaten

Pasuruan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan badan di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indikator) yang terukur.

Adapun tujuan yang dicapai Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan adalah Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Sedangkan Sasaran strategis Kecamatan Pohjentrek merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran strategis Kecamatan Pohjentrek adalah Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator kinerjanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) Kecamatan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan merupakan

suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Dengan mempertimbangkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan Periode 2018-2023 khususnya misi ke empat yaitu Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi, maka Program-program serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah 4 program 10 kegiatan 27 subkegiatan, dengan total pagu kebutuhan indikatif sebesar 3.233.575.000,00 bersumber dari Dana Alokasi Umum, adapun program kegiatan tersebut sebagai berikut :

KODE	URAIAN
7	UNSUR KEWILAYAHAN
7.01	KECAMATAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kleengkapannya
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan

	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun rencana kerja dan pendanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 serta implementasi rencana program/kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana pada table 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Pohjentrek Tahun 2022 dan Prakiraan maju 2023 berikut :

BAB IV
Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : Kecamatan Pohjentrek

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7 01	KECAMATAN								
7 01 01	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	Kecamatan Pohjentrek	100%	2.688.126.029,00			100%	2.956.938.631,90
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang disusun sesuai pedoman	Kecamatan Pohjentrek	100%	2.400.000,00			100%	2.640.000,00
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Laporan yang dihasilkan		5 Dokumen	1.200.000,00 a. Belanja Operasi : 1.200.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 1.200.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		5 Dokumen	1.320.000,00
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang dihasilkan		5 Dokumen	1.200.000,00 a. Belanja Operasi : 1.200.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 1.200.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		5 Dokumen	1.320.000,00
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Gaji ASN, Honararium PTT, Upah THL, dan Honor penatausahaan Keuangan	Kecamatan Pohjentrek	100%	2.458.871.000,00			100%	2.704.758.100,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pohjentrek	14 Bulan	<u>1.943.711.000,00</u> a. Belanja Operasi : 1.943.711.000,00 >Belanja Pegawai : 1.943.711.000,00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		14 Bulan	2.138.082.100,00
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Honorarium PTT dan Upah THL	Kecamatan Pohjentrek	12 Bulan	<u>475.800.000,00</u> a. Belanja Operasi : 475.800.000,00 >Belanja Pegawai : 475.800.000,00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		12 Bulan	523.380.000,00
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Pohjentrek	12 Bulan	<u>39.360.000,00</u> a. Belanja Operasi : 39.360.000,00 >Belanja Pegawai : 39.360.000,00 >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		12 Bulan	43.296.000,00
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima manfaat	Kecamatan Pohjentrek	22 Pegawai	<u>7.000.000,00</u>			22 Pegawai	7.700.000,00
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	20 Stel	<u>5.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 5.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		20 Stel	5.500.000,00
7 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang diikuti	Kecamatan Pohjentrek	2 Orang	<u>2.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 2.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		2 Orang	2.200.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersedianya Kebutuhan Umum Kantor	Kecamatan Pohjentrek	100%	23.855.029,00			100%	26.240.531,90
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kebersihan, BHP kebersihan, Alat elektronik yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	15 Jenis	5.000.000,00 a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		15 Jenis	5.500.000,00
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	3 Komponen	5.000.000,00 a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		3 Komponen	5.500.000,00
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	4 Jenis	3.855.029,00 a. Belanja Operasi : 3.855.029,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 3.855.029,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		4 Jenis	4.240.531,90
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Pohjentrek	2 Paket	10.000.000,00 a. Belanja Operasi : 10.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 10.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		2 Paket	11.000.000,00
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	Kecamatan Pohjentrek	5 Kegiatan	133.000.000,00			5 Kegiatan	146.300.000,00
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	1 Unit	- a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Unit	-

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli	Kecamatan Pohjentrek	4 Unit	<u>3.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 3.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		4 Unit	3.300.000,00
7 01 01 2.07 9	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan yang diadakan	Kecamatan Pohjentrek	1 Unit	<u>50.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 50.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Unit	55.000.000,00
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang di adakan	Kecamatan Pohjentrek	1 Unit	<u>50.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 50.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Unit	55.000.000,00
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang diadakan	Kecamatan Pohjentrek	1 Unit	<u>30.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : - >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : >Belanja hibah : b. Belanja Modal : 30.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Unit	33.000.000,00
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Kantor	Kecamatan Pohjentrek	12 Bulan	15.000.000,00			12 Bulan	16.500.000,00
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Air, dan Internet selama 12 bulan	Kecamatan Pohjentrek	12 Bulan	<u>15.000.000,00</u> a. Belanja Operasi : 15.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 15.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		12 Bulan	16.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah guna menunjang pelayanan	Kecamatan Pohjentrek	4 Kegiatan	48.000.000,00			4 Kegiatan	52.800.000,00
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pohjentrek	12 Bulan	30.000.000,00	DAU		12 Bulan	33.000.000,00
					a. Belanja Operasi : 30.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 30.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Pohjentrek	2 Jenis	3.000.000,00	DAU		2 Jenis	3.300.000,00
					a. Belanja Operasi : 3.000.000,00 >Belanja Pegawai : - >Belanja barang & jasa : 3.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Pohjentrek	1 Ls	5.000.000,00	DAU		1 Ls	5.500.000,00
					a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Pohjentrek	1 Ls	5.000.000,00	DAU		1 Ls	5.500.000,00
					a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kecamatan Pohjentrek	1 Ls	5.000.000,00	DAU		1 Ls	5.500.000,00
					a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	86,98	10.000.000,00			86,98	11.000.000,00
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	2 Sub Kegiatan	10.000.000,00			2 Sub Kegiatan	11.000.000,00
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Hasil Forum	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	5.000.000,00 a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Laporan	5.500.000,00
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan untuk meningkatkan efektifitas Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	5 Laporan	5.000.000,00 a. Belanja Operasi : 5.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 5.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		5 Laporan	5.500.000,00
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina	Kecamatan Pohjentrek	1 Organisasi	3.300.000,00			1 Organisasi	3.630.000,00
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	3.300.000,00			1 Laporan	3.630.000,00
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan	Kecamatan Pohjentrek	1 Laporan	3.300.000,00 a. Belanja Operasi : 3.300.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 3.300.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		1 Laporan	3.630.000,00
7 01 04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rasio Jumlah Kejadian yang Terasilitasi terhadap Jumlah Kejadian sesuai dengan Kewenangan Kecamatan	Kecamatan Pohjentrek	100%	16.000.000,00			100%	17.600.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif	Kecamatan Pohjentrek	2 Sub Kegiatan	16.000.000,00			2 Sub Kegiatan	17.600.000,00
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan operasi lapangan dengan aparatus TNI, POLRI	Kecamatan Pohjentrek	4 Laporan	10.000.000,00 a. Belanja Operasi : 10.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 10.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		4 Laporan	11.000.000,00
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pohjentrek	6 Laporan	6.000.000,00 a. Belanja Operasi : 6.000.000,00 >Belanja Pegawai : >Belanja barang & jasa : 6.000.000,00 >Belanja hibah : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		6 Laporan	6.600.000,00
					a. Belanja Operasi : 2.577.426.029,00 >Belanja Pegawai : 2.458.871.000,00 >Belanja barang & jasa : 118.555.029,00 >Belanja hibah : - b. Belanja Modal : 140.000.000,00 c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
					Total Belanja PD : 2.717.426.029,00				

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Pohjentrek dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pasuruan di Kecamatan Pohjentrek.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Pohjentrek dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan.

Kritik dan saran yang bersifat konstruktif, sangat diperlukan terutama pada implementasi rencana kerja ini, karena, hakekat perencanaan adalah prediksi yang berdasarkan perhitungan saat ini. Pada pelaksanaannya akan muncul berbagai kemungkinan pergeseran yang melampaui perhitungan saat ini. Maka perlu adanya fleksibilitas rencana sehingga dokumen perencanaan ini tetap dijaga kualitasnya.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF